

EDITORIAL

# Menolong Warga Rentan Miskin

DALAM setiap krisis yang berdampak pada perekonomian, masyarakat berpendapatan rendah hampir selalu menjadi korban yang pertama jatuh. Bantuan sosial dari pemerintah pun otomatis diarahkan kepada mereka. Demikian pula yang terjadi pada krisis akibat wabah covid-19 saat ini.

Untuk kelompok miskin, penyaluran bantuan pemerintah relatif mudah karena mereka sudah terdata sebagai penerima bantuan reguler. Korban selanjutnya ialah kelompok masyarakat rentan miskin.

Berdasarkan riset yang dipublikasikan akhir Januari lalu, Bank Dunia mencatat jumlah masyarakat rentan miskin di Indonesia mencapai 115 juta orang. Warga yang tergolong kelompok rentan miskin menghabiskan Rp532.000-Rp1,2 juta per orang per bulan.

Dengan demikian, untuk keluarga dengan dua anak misalnya, pengeluaran keluarga rentan miskin sekitar Rp2,1 juta-Rp4,8 juta tiap bulannya.

Mereka ini yang berada pada posisi yang justru bisa lebih mengesankan ketimbang kelompok miskin. Pasalnya, mereka tidak terdata sebagai sasaran bantuan sosial pemerintah.

Ketika gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda, banyak di antara mereka yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja kesulitan.

Di sini kesiapan pemerintah daerah diperlukan. Kementerian Sosial telah memberikan lampu hijau untuk usulan calon penerima bansos dari daerah.

Pemda diharapkan bekerja cepat untuk mendata warga yang jatuh miskin sembari memperbaiki data penerima agar tidak salah sasaran.

Dalam situasi darurat saat ini, masukan masyarakat menjadi semakin krusial untuk meluruskan data penerima bansos. Warga sekaligus menjadi pengawas penyaluran bantuan dari pemerintah. Tugas pemda memverifikasi dan memvalidasi masukan-masukan warga.

Jaring pengaman sosial yang lebih lebar masih bisa dibentangkan untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rapuh akibat wabah covid-19. Kali ini tidak

hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi ikut melibatkan kebijakan industri finansial.

Kita tahu betul, tahun lalu saat perekonomian masih normal, bank-bank besar mampu mereguk laba puluhan triliun. Itu semua berkat simpanan, konsumsi, hingga aktivitas peniagaan masyarakat. Kini sebagian 'kontributor' laba yang fantastis itu tengah kesulitan membayar cicilan pinjaman. Alangkah baiknya bila perbankan ikut membantu.

Ketimbang mengirimkan pesan bahwa cicilan pinjaman sudah mendekati jatuh tempo atau peringatan tunggakan, mengapa tidak mengirimkan surat cinta? Isinya memberitahukan debitur opsi-opsi keringanan pembayaran cicilan.

Contohnya, bank memberi penangguhan pembayaran cicilan berupa bunga dan pokok selama periode tertentu. Pun debitur bisa membayar cicilan berupa bunga saja selama 2-3 bulan, kemudian bulan berikutnya baru membayar penuh.

Tentu saja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur yang membuktikan dirinya kesulitan membayar cicilan pinjaman. Agar tidak menjadi sekadar kesadaran, sebaiknya regulator menetapkan kebijakan keringanan pembayaran pinjaman.

Pandemi covid-19 merupakan bencana nasional, maka seyogianya semua elemen bangsa ikut bergotong royong menanggulangi dampaknya. Hal itu mengingat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah.

Di tingkat warga, muncul pahlawan-pahlawan sosial yang mengulurkan tangan untuk kerabat, tetangga, hingga warga sekitarnya yang kesulitan ekonomi akibat wabah. Perbankan pun bisa turut menjadi pahlawan dengan meringankan beban debitur.



Silakan tanggapi melalui:  
[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) dan  
[www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com)  
 Simak tayangannya di:  
[www.mediaindonesia.com/editorials](http://www.mediaindonesia.com/editorials)

# Kasus Epidemologi Unta

Sambungan dari Halaman 1

Menurut Opitz, epidemi yang menyerang kaum Tsamud ialah sejenis *typhus exanthematicus*, yang bermula dari keracunan disertai larutan darah dan kerusak pembuluh darah yang menyebabkan penyakit kuning (*icterus*) dan selanjutnya menimbulkan pendarahan pada seluruh bagian kulit.

Pada hari ketiga, kulit menjadi hitam warnanya karena virus sudah menyerang empedu yang mengeluarkan zat warna hitam.

Lalu pada penghujung hari ketiga, virus ganas tersebut juga menyerang telinga, yang selanjutnya dirasakan si penderita bagaikan bunyi yang teramat dahsyat serta jantung yang terkoyak-koyak sebagai akibat pendarahan yang hebat dalam otot jantung.

Pada saat yang bersamaan, virus ganas tersebut menyerang gendang-gendang telinga sehingga mereka bagaikan mendengar sebuah bunyi yang amat dahsyat dan sesudah itu mereka mati bergelimpangan.

Dr Ahmad Ramali berpenda-

pat bahwa virus tersebut ialah sejenis antraks (*anthrax-septicaemia*). Daging hewan yang sudah ditulari antraks menyebabkan orang beramai-ramai terkena.

Kemungkinan lainnya, menurut Ahmad Ramali, ialah sejenis sampar, yakni *pestis haemorrhagica* yang ditularkan unta tersebut.

Kisah tersebut memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa penularan virus binatang kepada manusia dimungkinkan terjadi, bahkan dapat berakibat sangat fatal seperti ditunjukkan pada

kisah dalam Alquran di atas.

Berbagai usaha dan dana kini telah digunakan untuk menemukan antivirus yang mewabah lebih kompleks, tetapi belum ditelusuri lebih jauh hingga hari ini.

Semua larangan Tuhan untuk memakan makanan atau minuman yang haram ada hikmahnya.

Semuanya bukan untuk Allah SWT, melainkan untuk kesejahteraan hidup manusia sendiri. Terkadang itu semua baru kita ketahui setelah 'nasi menjadi bubur'.



**DISEMPROT DISINFECTAN:** Petugas kesehatan menyemprotkan cairan disinfektan ke badan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi ABK kapal pesiar MV Dream Explorer setibanya di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. Sebelum dibawa menuju hotel untuk menjalani isolasi mandiri, sebanyak 359 anak buah kapal WNI itu terlebih dahulu menjalani *rapid test* dan seluruhnya dinyatakan negatif.

P.T. SURYA HUSADA INVESTMENT DAN ANAK PERUSAHAAN		LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Audited)			
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOUK) No. 43/SEOUK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, maka dibawah ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasian P.T. Surya Husada Investment dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.					
Laporan Keuangan P.T. Bank Bumi Arta Tbk. untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (diaudit) dipublikasikan melalui surat kabar Harian Kontan pada tanggal 08 April 2020.					
		Jakarta, 30 April 2020 Wikan Aryono S Presiden Direktur Hendrik Atmaja Direktur			
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)					
	31 DES 2019	31 DES 2018			
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Setara Kas	1.339.121	1.287.451			
Investasi Jangka Pendek	164.753	162.551			
Efektif	246.244	396.882			
Kredit Yang Diberikan Bersih	5.120.108	4.721.858			
Piutang Usaha	9.645	5.277			
Tagihan Akseptasi	12.548	17.871			
Piutang Premi	21.903	25.802			
Piutang Koasuransi	10.184	2.738			
Piutang Reasuransi	7.244	1.933			
Aset Reasuransi	54.773	48.036			
Persediaan	17.297	28.989			
Pendapatan Bunga yang Masih Harus Diterima	34.722	35.166			
Piutang Lain-Lain	16.128	13.089			
Pajak Dibayar Dimuka	6.639	6.874			
Biaya Dibayar Dimuka	25.652	39.411			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>7.086.961</b>	<b>6.783.928</b>			
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset Pajak Tangguhan - bersih	13.992	9.730			
Aset Tetap - net	852.535	852.372			
Aset Lainnya	67.423	48.427			
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>933.950</b>	<b>910.529</b>			
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.020.911</b>	<b>7.694.457</b>			
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Hutang Usaha	25.939	30.012			
Hutang Bank	8.296	9.426			
Liabilitas Segera	21.798	18.965			
Simpanan	5.835.823	5.573.653			
Simpanan dari Bank Lain	2.860	3.244			
Liabilitas Akseptasi	12.548	17.871			
Hutang Klaim	48.400	8.181			
Estimasi Klaim	18.096	33.467			
Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	76.818	47.259			
Hutang Premi Koasuransi	9.429	10.940			
Hutang Reasuransi	24.089	6.258			
Hutang Komisi	4.193	3.399			
Uang Muka Penjualan	2.049	3.077			
Hutang Pajak	15.682	15.201			
Bunga yang Masih Harus Dibayar	17.685	15.642			
Biaya yang Masih Harus Dibayar	8.710	9.605			
Hutang Sewa Guna Usaha	833	1.202			
Liabilitas Lain-lain	63.307	76.766			
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>6.152.825</b>	<b>5.874.768</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Hutang Pihak Berelasi	-	5			
Liabilitas Imbalan Kerja	75.371	67.710			
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>75.371</b>	<b>67.715</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>6.228.196</b>	<b>5.952.483</b>			
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham	9.000	9.000			
Tambahan Modal	-	5.135			
Saldo Laba	541.864	511.235			
Penghasilan Komprehensif Lain - Net	363.763	300.256			
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada :</b>	<b>854.627</b>	<b>825.626</b>			
Pemilik Perusahaan	938.088	916.348			
Keperlingan Non Pengendali	-	-			
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.792.715</b>	<b>1.741.974</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>8.020.911</b>	<b>7.694.457</b>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)					
	Modal Saham	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Keperlingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2018	14.135	467.225	274.325	839.800	1.595.485
Deviden Tunai	-	(14.499)	-	(12.601)	(27.100)
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	3.000	3.000
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	25.931	31.584	57.515
Labas Tahun Berjalan	-	58.509	-	54.565	113.074
Saldo 31 Desember 2018	14.135	511.235	300.256	916.348	1.741.974
Koreksi Ekuitas atas Tambahan Modal Disetor	(5.135)	5.135	-	-	-
Koreksi Ekuitas	-	(4.000)	-	(13.537)	(17.537)
Deviden Tunai	-	-	-	3.738	3.738
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	29.222	31.539	60.761
Labas Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2019	9.000	541.864	303.763	938.088	1.792.715

# Beban UMKM Dipangkas

Dalam rangka meringankan beban sektor UMKM terkait dampak pandemi covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi bunga kredit selama 6 bulan ke depan.

DHIKA KUSUMA WINATA  
[dhika@mediaindonesia.com](mailto:dhika@mediaindonesia.com)

RESIDEN Joko Widodo menegaskan hal itu saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Sebanyak lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM pun disiapkan. Sejumlah skema lain, termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro, pun digagas dengan target agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi covid-19.

"Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan ataupun perbankan," ungkap Presiden.

Kelima skema yang memangkas beban UMKM itu ialah, pertama, pelaku UMKM kategori miskin dan rentan terdampak covid-19 diupayakan masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Jenis bansos yang masuk ialah program keluarga harapan (PKH), paket sembako, bantuan langsung tunai desa, pembebasan pengurangan tarif listrik, dan kartu prakerja.

Kedua, insentif perpajakan diberikan bagi pelaku UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Mereka mendapat penurunan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0% selama enam bulan.

Ketiga, diberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, permodalan nasional madani membina keluarga sejahtera, lembaga pengelola dana bergulir, hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Keempat, bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak covid-19. Kelima, pemerintah daerah akan bertindak sebagai

penyangga dalam ekosistem UMKM pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi, seperti BUMN disiapkan menjadi penyerap hasil produksi UMKM.

## Penundaan

Selaras dengan arahan Presiden, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin, juga mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit hingga 6% dan paling lama selama 6 bulan kepada sektor UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

Subsidi itu berlaku selama 6 bulan dengan ketentuan, debitur dengan nilai kredit di bawah Rp500 juta mendapatkan subsidi 6% di 3 bulan pertama dan 3% di 3 bulan berikutnya. "Itu untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan juga untuk kredit-kredit yang sampai Rp500 juta," tutur Airlangga.

Sementara itu, debitur dengan nilai kredit di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar mendapatkan subsidi bunga 3% pada 3 bulan pertama dan 2% pada 3 bulan kedua. Untuk kredit di bawah Rp10 juta, seperti ultramikro (umi), Mekaar, dan Pegadaian akan disubsidi bunga kredit sebesar 6% selama 6 bulan.

Pada bagian lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total penundaan pembayaran untuk angsuran pokok kredit, yang termasuk kredit UMKM dan juga ultramikro selama enam bulan mencapai Rp271 triliun. Dari total Rp271 triliun itu, untuk penundaan bayar cicilan pokok kredit usaha rakyat, ultramikro, Program Mekaar, dan kredit di Pegadaian mencapai Rp105,7 triliun. Adapun untuk penundaan bayar cicilan pokok kredit UMKM di Bank Perkreditan Rakyat, perbankan umum dan perusahaan pembiayaan mencapai Rp165,4 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan UMKM yang dapat memperoleh keringanan pembayaran kredit ialah yang tidak masuk ke daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Mir/Ant/X-6)